

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abu DaudBusroh,*Ilmu Negara*. Jakarta: BumiAksara, 2011.

Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif*. Jakarta: Konstutusi Press, 2013.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2004.

Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: PT.Alumni Bandung, 1997.

\_\_\_\_\_, *Beberapa masalah hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT.Alumni Bandung, 1997.

Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisus, Yogyakarta, 2004

\_\_\_\_\_, *.Ilmu Perundang-undangan ; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisus, Yogyakarta, 2007.

Hamidi Jazim, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung:PT.Alumni Bandung, 2010.

JimlyAsshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta:RajaGrafindoPersada, 2010.

\_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, SinarGrafika, Jakarta Timur, 2010.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di bidang Peraturan Pengganti Undang- Undang (Perpu)*. UMM Press, Malang,2003.

S.S Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Appolo, Jakarta, 1997.

Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1996 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan

Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No.7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## C. Jurnal

Ni'matul Huda. *Problematika substantif Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4, Desember 2013.

Malik, *Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.

Retno Saraswati, *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*, jurnal Masalah-Masalah Hukum, No. 41/I/2012.

M. Armia, MH, PhD, *Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Volume 48, Nomor 1, Juni 2014.

\_\_\_\_\_, *Analisis terhadap "kegentingan yang memaksa"*. Jurnal ilmu hukum, Vol.48, No.1, Juni 2014.

I Gede Pantja Astawa, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Versus Putusan Final Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstutusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.

Anthon F.Santoso, *Problematika Nalar dan Kekuasaan Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/Hum/2011*, dalam Jurnal Yudisial, No.5/II/2012.

#### D. Website

Ari Syamsurijal, *Syarat-Syarat Penetapan Perpu oleh Presiden*.<http://m.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt588b1b2dfbd2/syarat-syarat-penetapan-perpu-oleh-presiden>.

Aditama, *Hal Inti Hukum Tata Negara*, <http://aditama.blog.uns.ac.id/files/2013/07/2.-hal-inti-htn.docx>,

Abu Saman Lubis, *Memahami Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional*,[http://infobanknew.com/memahami\\_peran\\_lembaga\\_penjamin\\_simpanan\\_sebagai\\_jaring\\_pengaman\\_sistem\\_perbankan\\_nasional/](http://infobanknew.com/memahami_peran_lembaga_penjamin_simpanan_sebagai_jaring_pengaman_sistem_perbankan_nasional/),

Bank Indonesia, *Manajemen Krisis*, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/manajemen-krisis/jaring-pengaman/Contents/Default.aspx>.

CNN Indonesia, *Perpu JPSK Resmi Dicabut Melalui Rapat Paripurna DPR*,<http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20150707183251-78-65012/perppu-jpsk-resmi-dicabut-melalui-rapat-paripurna-dpr/>.

Fauzi Zuhri, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, <http://ejournal.unesa.ac.id/article/12507/43/article.doc>.

Finance Detik.Com, *Perpu JPSK Masih Berlaku*, <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1056084/perpu-jpsk-masih-tetap-berlaku>,

Harian Ekonomi Neraca, *Cabut Perpu JPSK sebelum Bahas RUU JPSK*, <http://www.neraca.co.id/article/19941/cabut-perpu-jpsk-sebelum-bahas-ruu-jpsk#!auth>,

KBBI, *Implikasi*, <http://kbbi.web.id/implikasi>,

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *DPR RI Setujui Pencabutan Perpu JPSK*, <http://www.kemenkeu.go.id/SP/dpr-ri-setujui-pencabutan-perpu-jpsk>

Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2009*, <http://www.peraturan.go.id/perpu/nomor-4-tahun-2009.html>,

Lembaga Penjamin Simpanan, *PERPU No.4 Th 2008 ttg JPSK*, [http://lps.go.id/ketentuan-terkait-/asset\\_publisher/nZ5y/content/perpu-4-th-2008-ttg-jpsk](http://lps.go.id/ketentuan-terkait-/asset_publisher/nZ5y/content/perpu-4-th-2008-ttg-jpsk).

Liputan 6, *Era Jokowi, DPR Setuju Cabut Perpu JPSK*, <http://bbm.liputan6.com/read/2267668>.

Ministry of Finance Republic of Indonesia, *DPR RI Setujui Pencabutan Perpu JPSK*, <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/46387>,

Oka Mahendra S.H, *Implikasi Hukum*, <https://okamahendra.wordpress.com/2008/12/15/implikasi-hukum/>,

Rezkiana Nisaputra, *Rancangan Undang-Undang Penanganan Krisis Terus Disempurnakan*, <http://infobanknews.com/ruu-penanganan-krisis-terus-disempurnakan/>,

Saktiryan, *Membuka Mata Melihat Realita*, <https://saktiryan.wordpress.com/2014/05/27/membuka-mata-melihat-realita-enam-tahun-misteri-kasus-bank-century-bagian-i/>.

Sugi Arto, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, <http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/tata-urutanhierarki-peraturan-perundang.html?m=1>.

Stabilitas Keuangan, *Sandera Perpu JPSK*, <https://stabilitaskeuangan.wordpress.com/tag/jpsk/>,

Suara Merdeka, *Menguji Legalitas Perpu JPSK*, <http://artikel-media.co.id/2010/01/menguji-legalitas-perpu-jpsk.html>,

Yuli Harsono, *Polemik Penolakan Perpu JPSK*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b557621e5e83/polemik-penolakan-perpu-jpsk-br-oleh-yuli-harsono>.

Wikipedia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/peraturan\\_pemerintah\\_pengganti\\_Undang-Undang\\_\(indonesia\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/peraturan_pemerintah_pengganti_Undang-Undang_(indonesia)),

Surya Walfajri, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>,